



SMK BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENGELIMINASI CITRA SEKOLAH *SECOND CHOICE*

Andi Muhammad Irfan¹, Nurlaela², dan Sunardi³

^{1,2,3} Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar

¹ andimuhhammadirfan@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kajian kritis tentang SMK sebagai *second choice* dan upaya eliminasinya melalui pengembangan paket keahlian berbasis potensi unggulan daerah dan kebutuhan masyarakat. Idealnya SMK berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi angka pengangguran, maka seharusnya SMK menjadi primadona. Namun pada kenyataannya SMK masih dipandang sebelah mata dan dijadikan *second choice* oleh masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah ketidakmampuan lulusan untuk berkontribusi di masyarakat yang akhirnya dapat membentuk persepsi bahwa SMK tidak menjanjikan. Tidak relevannya kompetensi yang dimiliki lulusan dengan potensi unggulan daerah yang ada dan kebutuhan masyarakat ditengarai menjadi salah satu penyebabnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengeliminasi pencitraan SMK sebagai *second choice* dan menjadikannya sebagai *first choice* adalah melalui pengembangan paket keahlian berbasis potensi unggulan daerah dan kebutuhan daerah. Hal tersebut penting untuk dilakukan sebagai upaya mewujudkan SMK yang mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi unggulan daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: potensi unggulan daerah, kebutuhan masyarakat, second choice, SMK

PENDAHULUAN

Kemajuan bangsa tergantung pada mutu pendidikan generasi muda. Kualitas sumber daya manusia dipandang sebagai salah satu faktor kunci dalam era global saat ini. Kualitas sumber daya manusia tersebut, salah satunya dapat diperoleh melalui pendidikan. Kemajuan suatu bangsa ditandai dan diukur dari pendidikan (Zainuddin, 2008). Pendidikan memiliki andil dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sejumlah negara berkembang yang memiliki investasi modal tidak mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi karena kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan.

Pembangunan bidang pendidikan dihadapkan pada besarnya angka pengangguran akibat adanya ketimpangan antara output pendidikan dengan lapangan kerja dan ketersediaan

lapangan kerja formal. Satu sisi jumlah angkatan kerja terus bertambah akan tetapi pada sisi lain ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding. Lulusan sekolah menengah menjadi masalah manakala mereka tidak bekerja, sehingga melahirkan pengangguran terbuka. Sekolah menengah kejuruan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Tujuan demikian, membawa konsekuensi bahwa sekolah menengah kejuruan dituntut mampu membekali lulusannya dengan seperangkat kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja. Oleh karena itu program pendidikan sekolah menengah kejuruan lebih mengutamakan pada pengembangan kemampuan siswa untuk dapat melaksanakan jenis



pekerjaan tertentu. Hal itu sejalan dengan konsep dasar pendidikan kejuruan yaitu menyiapkan tenaga teknisi tingkat menengah untuk bekerja di industri dan mengisi kesempatan kerja baru yang terbuka seiring dengan perkembangan dunia industri.

Sekolah menengah kejuruan berperan penting dalam membentuk sumber daya handal sebagai lulusan yang siap kerja. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah tahun 2005-2009 menjelaskan bahwa sekolah menengah kejuruan merupakan salah satu jenis satuan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terbukti memiliki peran strategis dalam pendidikan ketenagakerjaan. Sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga pendidikan kejuruan bertujuan mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang kompeten dan mandiri dengan mengutamakan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keahliannya.

Sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah yang berorientasi pada dunia kerja dan salah satu tujuannya memberikan bekal siap kerja pada siswa sebagai tenaga kerja yang terampil tingkat menengah sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh dunia kerja. Pendidikan menengah kejuruan harus dijalankan atas dasar prinsip investasi yaitu mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan eksistensi peserta didik, untuk kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara (Djojonegoro, 1998).

Sekolah menengah kejuruan memiliki multi fungsi dan manfaat dalam pembangunan wilayah. Pengembangan wilayah merupakan suatu proses kontinyu yang melibatkan aspek ekonomi, aspek sosial, lingkungan dan politik. Sedang potensi wilayah dapat dilihat dari bagaimana wilayah tersebut memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri.

Peningkatan produktifitas didukung oleh tenaga kerja yang terampil di bidangnya. Tenaga kerja yang terampil salah satunya dapat diperoleh dan pendidikan kejuruan (Argadewi, et.al, 2009).

Dalam rangka pendayagunaan potensi dan pengembangan ekonomi daerah keberadaan lembaga pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan mempunyai fungsi dan peran sangat strategis. Namun demikian fungsi strategis tersebut belum tentu dapat dilaksanakan mengingat kebijakan pengembangan sekolah menengah kejuruan selama ini hampir dapat dikatakan tidak bersentuhan dengan kebutuhan daerah. Untuk itu dalam hubungannya dengan upaya pengembangan perekonomian daerah, muncul permasalahan bagaimanakah sekolah menengah kejuruan seharusnya dikembangkan sehingga dapat melaksanakan fungsi strategis mendukung upaya pengembangan ekonomi daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya sekolah kejuruan menjadi primadona, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah sekolah kejuruan masih dianggap sebelah mata, masih kalah pamor jika dibandingkan dengan sekolah umum atau dengan kata lain masih menjadi pilihan kedua. Dengan pamor sekolah kejuruan saat ini yang dianggap masih kalah jika dibandingkan dengan sekolah umum menjadikan sekolah kejuruan menjadi pilihan kedua, sehingga merupakan hal yang sulit untuk menjawab tuntutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pengembangan sekolah kejuruan dewasa ini masih dilakukan berdasarkan animo masyarakat dengan jurusan yang sedang tren, sehingga lulusan sekolah kejuruan cenderung memilih untuk mencari kerja di daerah perkotaan pada sektor formal. Kondisi seperti ini menjadikan perkembangan daerah menjadi lambat karena tenaga-tenaga



terampil yang mestinya bisa diarahkan untuk membangun daerahnya malah memilih untuk bekerja di daerah lain. Akan tetapi hal ini akan berbeda jika pengembangan sekolah kejuruan diarahkan pada pengembangan potensi wilayah, dengan kata lain pengembangan sekolah kejuruan berbasis potensi unggulan daerah dan analisis kebutuhan.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah stigma yang terlanjur melekat di masyarakat, khususnya orang tua siswa sekolah menengah pertama yang masih memandang dengan sebelah mata sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan masih dianggap sekolah kelas dua dibandingkan dengan sekolah menengah atas. Masyarakat beranggapan bahwa sekolah menengah kejuruan merupakan pilihan nomor dua setelah sekolah menengah atas, karena sebagian besar para siswa lulusan sekolah menengah pertama yang tidak diterima di sekolah menengah atas, pilihan sekolah berikutnya adalah sekolah menengah kejuruan. Sehingga kesannya sekolah-sekolah kejuruan itu kurang baik. Lulusan sekolah menengah kejuruan dipandang tidak sebaik para lulusan sekolah menengah atas.

Realitas yang berkembang di masyarakat saat ini, menunjukkan bahwa sekolah menengah kejuruan masih menjadi sekolah pilihan kedua sehingga siswa yang masuk sekolah menengah kejuruan sebagian besar adalah siswa yang tidak diterima di sekolah menengah atas. Nazara dan Wicaksono (2008) menemukan bahwa siswa lulusan sekolah menengah pertama masih menganggap sekolah menengah atas lebih superior terutama karena fleksibilitas dalam bidang pekerjaan serta kemungkinan yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sementara lulusan sekolah menengah kejuruan dianggap lebih dipersiapkan untuk langsung bekerja, bukan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Sekolah menengah kejuruan dianggap merupakan pilihan kedua, maka keberadaan atau perannya perlu ditinjau kembali supaya cita-cita sekolah menengah kejuruan dapat terwujud. Reformasi total pendidikan kejuruan perlu dilakukan agar eksistensinya tetap terjaga melalui upaya bagaimana menjadikan sekolah menengah kejuruan sebagai pilihan oleh masyarakat karena sekolah menengah kejuruan menjanjikan suatu prospek masa depan generasi muda dengan keahlian tertentu. Seandainya sekolah menengah kejuruan tetap dipertahankan keberadaannya, harus ada reformasi total di mana paket keahliannya harus betul-betul spesifik dan unik dan menjanjikan keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat. Karena keunikannya, sekolah menengah kejuruan yang demikian sangat sedikit jumlahnya dan mempunyai keluwesan mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat (Brodjonegoro, 2016).

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah berupaya untuk mewujudkan pendidikan kejuruan yang bertujuan agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dapat langsung diserap dunia kerja, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pengangguran. Tentunya pendidikan kejuruan yang seharusnya diwujudkan adalah berbasis potensi unggulan lokal dan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga lulusan kelak dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kajian kritis tentang sekolah menengah kejuruan sebagai *second choice* dan upaya eliminasinya melalui pengembangan paket keahlian berbasis potensi unggulan lokal dan *community needs assessment*.



PEMBAHASAN

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan

Pengembangan sekolah menengah kejuruan seharusnya disesuaikan dengan perspektif lokal, dimana sekolah menengah kejuruan yang dikembangkan sesuai dengan permintaan terhadap bidang keahlian di wilayah yang bersangkutan. Sesuai dengan pemetaan potensi industri, maka pengembangan sekolah menengah kejuruan sebaiknya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan industri di masa mendatang di masing-masing daerah. Bentuk kerjasama dengan industri untuk menampung lulusan sekolah menengah kejuruan dan sebagai tempat magang bagi siswa. Selain itu, sangat penting untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengakomodasi pengembangan sekolah menengah kejuruan di daerah masing-masing.

Dalam konteks pengembangan pendidikan kejuruan, daerah memiliki kewenangan menentukan kebijakan pengembangan program pendidikan sekolah menengah kejuruan yang sesuai dengan konteks daerah. Program pendidikan sekolah menengah kejuruan dapat diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang produktif dan mampu memanfaatkan potensi perekonomian daerah sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan kemandirian daerah. Selain itu fungsi sekolah menengah kejuruan dikaitkan dengan penyediaan tenaga penggerak perekonomian daerah, dimana sekolah menengah kejuruan diharuskan agar mampu membuka cakrawala pemikiran lebih luas bagi tenaga kerja lulusan sekolah menengah kejuruan, sehingga para lulusan dapat mengembangkan potensi daerah dalam menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa. Kemampuan ini penting terutama dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, sehingga lulusan sekolah menengah

kejuruan tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang ada, akan tetapi mampu mengembangkan kesempatan kerja yang masih potensial dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah yang masih ada.

Salah satu wujud dari perencanaan pendidikan dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan adalah merencanakan pendidikan kejuruan yang relevan dengan potensi wilayahnya sehingga individu pelaku pembangunan memiliki daya tanggap dan kepekaan tinggi terhadap setiap fenomena perekonomian yang ada (Setyaningsih, 2008). Peningkatan peran dan fungsi sekolah menengah kejuruan pada dasarnya adalah suatu proses pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sekolah yang berbasis wilayah dan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh peluang dan potensi yang dimiliki (Bukit, 2003).

Sebagai tindak lanjut kebijakan 70% sekolah menengah kejuruan dan 30% sekolah menengah umum, maka setiap daerah harus siap menindaklanjuti dengan berbagai strategi. Selain aspek proporsi, satu aspek penting yang tidak boleh dilupakan adalah relevansi bidang atau program kejuruan yang akan dibuka dengan tuntutan dunia kerja dan potensi daerah masing-masing (Wagiran, 2010). Oleh karenanya setiap daerah dituntut mampu merencanakan jumlah dan jenis program kejuruan yang akan dikembangkan ke depan. Tanpa perencanaan tersebut mustahil didapatkan lulusan pendidikan kejuruan yang berkualitas dengan mutu yang memadai.

Program-program di sekolah menengah kejuruan seharusnya disusun selaras dengan kebutuhan peserta didik dan kemajemukan kebutuhan masyarakat serta dunia kerja dalam berbagai sektor. SMK dituntut untuk mengembangkan program-program berdasarkan keunggulan lokal, berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat dengan kekayaan alam yang beragam dan



melimpah serta kemajemukan sektor-sektor pembangunan.

Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Analisis Kebutuhan Masyarakat

Potensi wilayah yang dimiliki suatu daerah merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Upaya dilakukan melalui kebijakan pengembangan potensi berupa penyediaan sarana dan prasarana pembangunan termasuk diantaranya penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki tingkat keahlian yang signifikan yaitu dengan penyediaan lulusan sekolah kejuruan yang memiliki keahlian yang spesifik sesuai dengan potensi unggulan daerah.

Di era otonomi daerah saat ini, kesesuaian bidang keahlian yang dikembangkan sekolah menengah kejuruan dengan potensi daerah yang ada merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan (Hutagaol, 2009). Hal ini dimaksudkan agar keberadaan sekolah kejuruan dapat memberi manfaat dan dampak bagi daerah dalam mengembangkan potensinya untuk mencapai kemajuan. Keberadaan sekolah menengah kejuruan diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya lainnya. Pendirian sekolah menengah kejuruan diharapkan berdasarkan kepada potensi wilayah yang ada dengan maksud agar para siswa yang nantinya setelah lulus dapat menerapkan kemampuannya melalui bekerja pada dunia usaha atau dunia industri yang ada ataupun membuka usaha sendiri di daerah tersebut.

Dalam era otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi, penentuan pengembangan bidang studi keahlian sekolah menengah kejuruan perlu dipertimbangkan dan disesuaikan dengan potensi daerah. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan sekolah menengah kejuruan

benar-benar bermanfaat bagi daerah tersebut dalam memajukan dan mengembangkan potensi unggulan. sekolah menengah kejuruan diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya lainnya. Pemanfaatan potensi daerah sebagai basis pengembangan dan perluasan pendidikan harus dilihat dari tiga aspek utama, yaitu: (1) potensi geografis yang meliputi kekayaan alam, letak wilayah, dan sumber daya buatan; (2) faktor budaya, kepercayaan nilai-nilai moral, dan norma yang menentukan kepribadian masyarakatnya; dan (3) kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kemajuan masyarakatnya.

Keberagaman potensi keunggulan daerah harus dilestarikan dan dikembangkan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur di dalamnya melalui pendidikan. Menurut Prihartini, (2014) melalui keunggulan lokal realisasi peningkatan nilai dari potensi daerah diharapkan menjadi produk atau jasa atau karya yang bernilai tinggi bersifat unik dan memiliki keunggulan kompetitif. Tujuan penyelenggaraan sekolah berbasis keunggulan lokal antara lain agar peserta didik mengetahui keunggulan lokal daerah tempat mereka tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal tersebut. Dengan demikian, peserta didik mampu mengolah sumber daya, terlibat dalam pelayanan/jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan lokal, sehingga memperoleh penghasilan sekaligus melestarikan sumber daya yang menjadi unggulan daerah, serta mampu bersaing secara nasional dan global (Wasino, 2008).

Hasil penelitian Tito (2012) menunjukkan bahwa motivasi peserta didik dalam memilih sekolah menengah kejuruan salah satunya dipengaruhi oleh kompetensi keahlian yang ditawarkan oleh Sekolah Menengah kejuruan.



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompetensi keahlian yang ditawarkan oleh sekolah menengah kejuruan kepada masyarakat harus memperhatikan perkembangan akan kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian-penelitian tentang analisis kebutuhan program kejuruan yang diperlukan daerah dalam era otonomi, penting dilakukan guna mendapatkan gambaran obyektif dan data akurat sebagai bahan pertimbangan. Dengan kesesuaian program kejuruan dan karakteristik serta potensi daerah diharapkan mampu meningkatkan lapangan usaha bagi lulusan sekolah menengah kejuruan yang dapat berdampak pada kemajuan daerah tersebut. Relevansi terkait erat dengan bidang kejuruan apa yang hendak dibuka. Dari berbagai bidang keahlian yang direkomendasikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, menjadi tugas daerah untuk menentukan bidang keahlian apa yang layak untuk dibuka sesuai potensi maupun karakteristik masing-masing daerah.

Menurut Wagiran (2010), langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan program kejuruan yang dibutuhkan daerah antara lain: (1) menentukan tipologi daerah, (2) menentukan persediaan tenaga kerja daerah, (3) memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja, (4) memperhitungkan kebutuhan tenaga kerja daerah, (5) menentukan jumlah lembaga pendidikan berdasarkan bidang-bidang kejuruan.

Analisis kebutuhan program pendidikan kejuruan yang dibutuhkan daerah didasarkan pada perkiraan kebutuhan tenaga kerja pada periode tertentu, dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah. Hal ini selaras dengan semangat otonomi daerah termasuk desentralisasi dalam bidang pendidikan yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu aspek

dalam menumbuhkan perekonomian dan kemajuan daerah.

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sekolah menengah kejuruan agar tetap dapat terpelihara, maka sekolah menengah kejuruan harus menata kembali orientasi program pendidikan, yaitu dengan menyelenggarakan program pendidikan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Perluasan akses terhadap pendidikan di sekolah menengah kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi unggulan lokal daerah masing-masing. Perluasan sekolah menengah kejuruan ini dilaksanakan melalui penambahan paket keahlian yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Sehingga lulusan sekolah menengah kejuruan nantinya dapat berkontribusi dalam membangun daerah melalui pemanfaatan potensi unggulan yang akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi angka pengangguran.

Dengan demikian, melalui pengembangan paket keahlian berbasis potensi lokal dan analisis kebutuhan masyarakat maka diharapkan sekolah menengah kejuruan tidak lagi menjadi pilihan kedua bagi lulusan sekolah menengah pertama dalam melanjutkan pendidikannya, akan tetapi sekolah menengah kejuruan menjadi primadona dan merupakan pilihan pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Argadewi, O., Santoso, E.B., & Sunarti, E.T. (2009). Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berdasarkan Potensi Wilayah Kabupaten Kediri. *Jurnal Penataan Ruang*, 4 (1): 79-86.
- Brodjonegoro, S.S. (2016). *Revitalisasi Pendidikan Kejuruan*. Kompas, 10 Mei 2016.
- Bukit, M. (2003). *Kebijakan Pendidikan*. Seminar dan Pemaparan Kebijakan



- Pendidikan In-House Training-Competency Based Training. PPPGT, Bandung.*
- Djojonegoro, W. (1998). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui SMK*. Jakarta.
- Hutagaol, Y.M. (2009). *Minat dan Motivasi Siswa Memilih Sekolah Menengah Kejuruan Mendorong Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Muhardiansyah, D. et.al. (2010). *Inovasi Dalam Sistem Pendidikan Potret Praktik Tata Kelola Pendidikan Menengah Kejuruan*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Priartini. (2014). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Setyaningsih. (2008). *Konsep Pendidikan SMK Dalam Mengantisipasi Kebutuhan Pasar Kerja Untuk Mendukung Peningkatan potensi Wilayah di Surabaya*. Surabaya.
- Slamet, P.H. (2013). Pengembangan SMK Model untuk Masa Depan. *Cakrawala Pendidikan*, 1 (1): 14-26.
- Tito. (2012). Pengaruh Karakteristik Sekolah, Kompetensi Keahlian, Citra SMK dan Kelas Sosial Orang Tua Dalam keputusan Peserta Didik Memilih SMK di Kota Palangka Raya. *Jurnal Sains Manajemen*, 1 (1): 85-95.
- Wagiran. (2010). *Pengembangan Pendidikan Kejuruan Berbasis Potensi Daerah dan Sumberdaya Alam dalam Mendukung Continuing Vocational Education*. Disampaikan dalam Seminar Internasional Aptekindo, Undiksa 29 April-2 Mei 2010. Universitas Pendidikan Ganesa.
- Wasino. (2008). *Pendidikan Berbasis keunggulan lokal*. Dikases tanggal 10 Januari 2016 pada www.slideshare.net.
- Zainuddin. (2008). *Reformasi Pendidikan Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.